

MANUAL BOOK

Policy Brief AI

Sistem Penyusunan Policy Brief Rancangan Peraturan Bupati Berbasis AI

Susun Bahan Kebijakan Secara Cepat,
Rapi, dan Konsisten.



7 Langkah Mudah

Panduan pengisian data rancangan peraturan bupati secara sistematis.



Berbasis AI

Menggunakan teknologi AI untuk membantu penyusunan policy brief yang berkualitas.



Ekspor Dokumen

Hasil akhir dapat diunduh dalam format Microsoft Word (.docx).



Aman & Terpercaya

Data tersimpan dengan aman dan terstruktur.



Panduan Pengguna
Untuk OPD di Lingkungan
Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Manual Book Aplikasi Policy Brief AI. Buku panduan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Banyuwangi dalam menggunakan aplikasi untuk menyusun Policy Brief Rancangan Peraturan Bupati secara sistematis, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI), aplikasi ini membantu pengguna dalam mengolah informasi menjadi naskah policy brief yang lebih terstruktur tanpa mengurangi peran pengguna dalam menyusun substansi kebijakan. Manual book ini menjelaskan setiap tahapan penggunaan aplikasi mulai dari pengisian data, proses generate AI, hingga pengunduhan dokumen.

Semoga panduan ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna dan mendukung peningkatan kualitas penyusunan kebijakan di Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 6 Juli 2026

Penyusun

PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati memerlukan analisis yang mampu menjelaskan latar belakang, urgensi, dasar hukum, tujuan, serta dampak kebijakan yang akan diterapkan. Analisis tersebut harus disusun secara sistematis agar menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil keputusan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan Sistem Penyusunan Policy Brief Berbasis Artificial Intelligence (AI). Sistem ini membantu Perangkat Daerah menyusun draft awal Policy Brief melalui proses yang sederhana namun tetap mengacu pada kaidah penyusunan dokumen kebijakan.

Melalui aplikasi ini, penyusun cukup mengisi informasi pokok mengenai rancangan regulasi. Selanjutnya sistem akan menghasilkan dokumen Policy Brief yang dapat ditinjau kembali, disempurnakan, dan diunduh dalam format Microsoft Word.

Apa itu Policy Brief?

Policy Brief adalah dokumen analisis kebijakan yang disusun secara singkat, jelas, dan terstruktur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dokumen ini berfungsi menjelaskan suatu permasalahan, memberikan dasar hukum, menyampaikan tujuan kebijakan, serta menjelaskan manfaat yang akan diperoleh apabila kebijakan tersebut diterapkan.

Manfaat

Policy Brief memberikan berbagai manfaat, antara lain:

- membantu proses penyusunan regulasi menjadi lebih sistematis;
- memberikan dasar analisis terhadap suatu kebijakan;
- mempercepat proses pembahasan rancangan regulasi;
- meningkatkan kualitas argumentasi kebijakan;
- mendukung penyusunan regulasi berbasis data.

STRUKTUR POLICY BRIEF

POLICY BRIEF
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
TENTANG

(Judul Rancangan Peraturan Bupati)



DINAS / BADAN / BAGIAN(Nama Perangkat Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

..... (Tahun Penyusunan)

I. LATAR BELAKANG

.....

.....

.....

.....

.....

II. DASAR HUKUM KEWENANGAN

.....

.....

.....

.....

.....

III. URGENSI PENYUSUNAN

.....

.....

.....

.....

.....

IV. TUJUAN PENYUSUNAN

.....

.....

.....

.....

.....

V. SASARAN

.....

.....

.....

.....

VI. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

.....
.....
.....
.....
.....

VII. PENUTUP

.....
.....
.....
.....
.....

VIII. PENYUSUN

Nama	Jabatan/ Unit Kerja	Tanda Tangan

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan/Bagian

TTD.

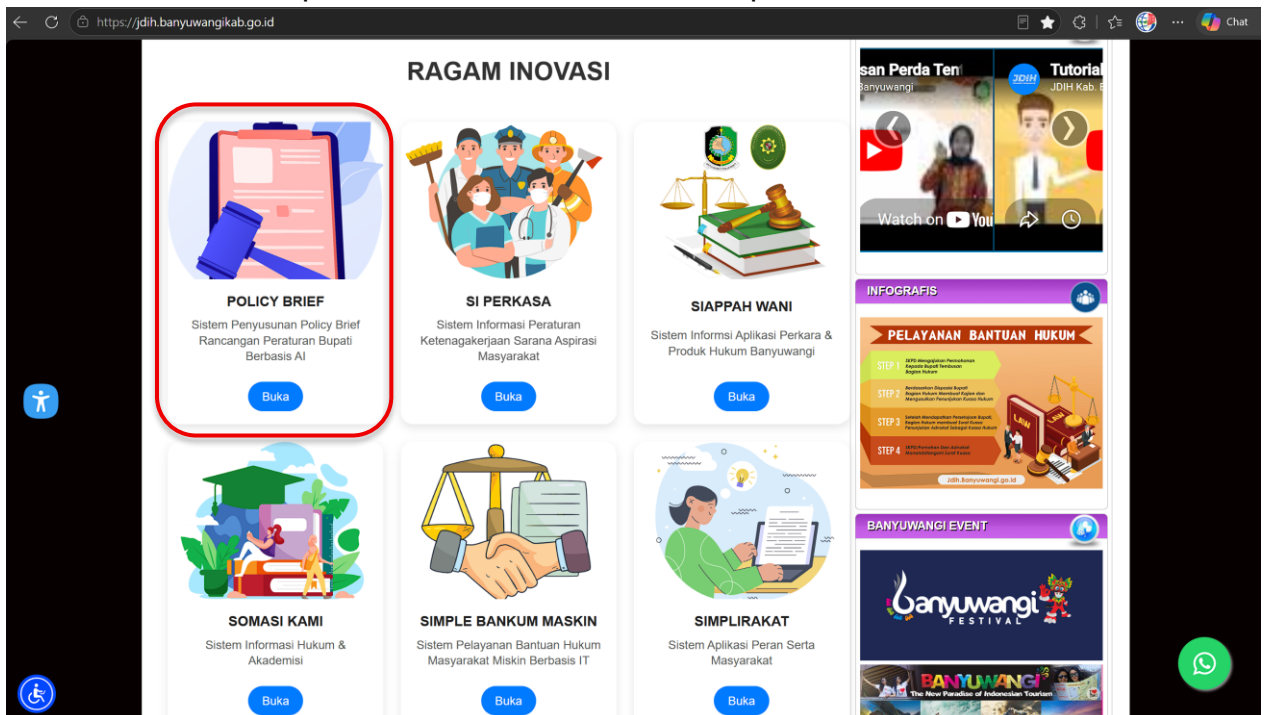
{Nama Terang}
Pangkat
NIP. xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx

ALUR PENGGUNAAN APLIKASI

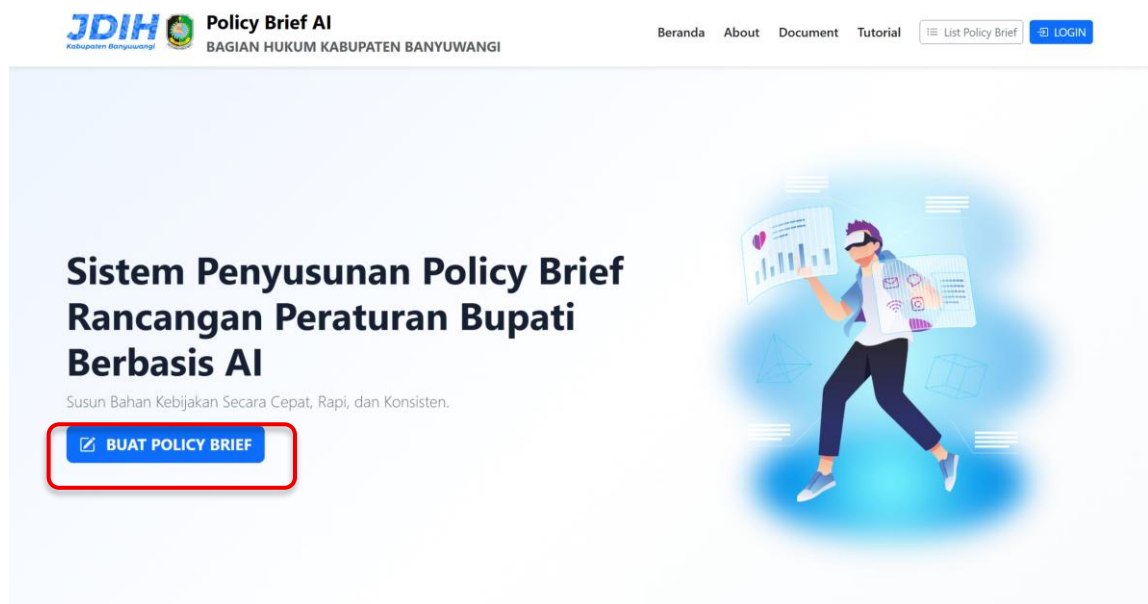
1. Buka Webiste JDIH Banyuwangi <https://jdi.banyuwangikab.go.id/>



2. Scroll ke bawah sampai ke menu RAGAM INOVASI pilih menu POLICY BRIEF



3. Masuk Ke halaman Policy Brief lalu klik Buat Policy Brief



4. Masukkan Judul Rancangan Peraturan Bupati yang akan dibuat

This screenshot shows the 'Form Wizard Policy Brief' interface at Step 1/8. The title is 'Nama Rancangan'. Below the title, there are three instructional points: 'Yang diisi : Tuliskan judul lengkap rancangan peraturan, biasanya diawali dengan kalimat "Rancangan Peraturan Bupati tentang ..." .', 'Contoh: Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Banyuwangi.', and 'Tujuan: Menentukan identitas dan fokus utama dari rancangan peraturan yang akan disusun.'. A text input field contains the example 'Rancangan Peraturan Bupati tentang gender'. At the bottom, there are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Lanjut' (Next).

5. Masukkan Isu atau Permasalahan yang mendasari peraturan

This screenshot shows the 'Form Wizard Policy Brief' interface at Step 2/8. The title is 'Isu atau Permasalahan'. Below the title, there are three instructional points: 'Yang diisi : Jelaskan permasalahan utama yang melatarbelakangi perlunya penyusunan peraturan.', 'Contoh: Tingginya angka pengangguran, belum adanya kepastian perlindungan tenaga kerja, serta belum optimalnya pengawasan ketenagakerjaan.', and 'Tujuan: Menjelaskan alasan mengapa regulasi perlu dibuat.'. A large text area contains the example text: 'Isu gender yang dapat dijadikan dasar Peraturan Bupati mencakup kesenjangan akses pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja bagi perempuan, minimnya layanan kesehatan reproduksi, tingginya kasus kekerasan berbasis gender, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan pekerjaan, serta norma budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga perlu kebijakan afirmasi, pemberdayaan, dan perlindungan yang lebih kuat.'. At the bottom, there are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Lanjut' (Next).

6. Masukan Dasar Hukum



Policy Brief AI
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

[Beranda](#) [About](#) [Document](#) [Tutorial](#) [List Policy Brief](#) [LOGIN](#)

Form Wizard Policy Brief

Step 3/8

Dasar Hukum

Yang diisi : Cantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan.

Contoh: UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP terkait, serta Peraturan Daerah.

Tujuan: Menunjukkan bahwa rancangan memiliki landasan hukum yang jelas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kembali

Lanjut

7. Masukan Kondisi Faktual



Policy Brief AI
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

[Beranda](#) [About](#) [Document](#) [Tutorial](#) [List Policy Brief](#) [LOGIN](#)

Form Wizard Policy Brief

Step 4/8

Kondisi Faktual

Yang diisi : Uraikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan data, hasil evaluasi atau fakta.

Contoh: Jumlah tenaga kerja meningkat namun belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Tujuan: Memberikan gambaran kondisi aktual sebagai dasar penyusunan kebijakan.

gender di banyuwangi masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan, di mana perempuan menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, dominasi di sektor kerja informal dengan upah rendah, serta keterbatasan layanan kesehatan reproduksi yang memadai; selain itu, kasus kekerasan berbasis gender masih tinggi dan sering tidak dilaporkan karena stigma sosial, sementara partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik masih rendah akibat budaya patriarki, sehingga perempuan menanggung beban ganda antara pekerjaan dan urusan rumah tangga tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

Kembali

Lanjut

8. Masukan Tujuan Penyusunan



Policy Brief AI
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

[Beranda](#) [About](#) [Document](#) [Tutorial](#) [List Policy Brief](#) [LOGIN](#)

Form Wizard Policy Brief

Step 5/8

Tujuan Penyusunan

Yang diisi : Jelaskan tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan peraturan.

Contoh: Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan memberikan kepastian hukum.

Tujuan: Menjelaskan hasil akhir yang diharapkan dari regulasi.

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang isu gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan masyarakat, meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan publik sehingga tercipta pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kembali

Lanjut

9. Masukan Ruang Lingkup



Policy Brief AI
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

[Beranda](#) [About](#) [Document](#) [Tutorial](#) [List Policy Brief](#) [LOGIN](#)

Form Wizard Policy Brief

Step 6/8

Ruang Lingkup

Yang diisi : Jelaskan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan.

Contoh: Hak dan kewajiban pekerja, kewajiban perusahaan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi.

Tujuan: Menentukan batasan substansi yang akan diatur.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang isu gender meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi melalui kesempatan kerja yang setara, penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan dan dukungan terhadap peran ganda perempuan, serta perubahan norma sosial dan budaya menuju kesetaraan gender yang berkeadilan.

[Kembali](#) [Lanjut](#)

10. Masukan Harapan dan Dampak



Policy Brief AI
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

[Beranda](#) [About](#) [Document](#) [Tutorial](#) [List Policy Brief](#) [LOGIN](#)

Form Wizard Policy Brief

Step 7/8

Harapan atau Dampak

Yang diisi : Jelaskan dampak positif yang diharapkan setelah peraturan diterapkan.

Contoh: Terciptanya kepastian hukum, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik yang lebih baik.

Tujuan: Menjelaskan manfaat yang akan diperoleh dari implementasi regulasi.

Harapan dari penyusunan Peraturan Bupati tentang isu gender adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif, di mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta ruang partisipasi publik. Dampak yang diharapkan adalah menurunnya kasus kekerasan berbasis gender, meningkatnya kualitas hidup perempuan, terwujudnya pemberdayaan ekonomi keluarga, serta terbentuknya budaya baru yang mendukung kesetaraan gender sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

[Kembali](#) [Lanjut](#)

11. Masuk ke halaman Preview bisa di cek jika sudah benar klik Simpan dan Review

Form Wizard Policy Brief

Step 8/8

Review Policy Brief

✓ Periksa kembali seluruh data yang telah Anda isi.

Jika masih ada yang salah, klik tombol Kembali.

Jika seluruh data sudah benar, klik tombol **Simpan dan Review** untuk diproses oleh AI.

Nama Rancangan

Rancangan Peraturan Bupati tentang gender

Isu atau Permasalahan

Isu gender yang dapat dijadikan dasar Peraturan Bupati mencakup kesenjangan akses pendidikan, keterbatasan kesempatan kerja bagi perempuan, minimnya layanan kesehatan reproduksi, tingginya kasus kekerasan berbasis gender, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, beban ganda perempuan dalam rumah tangga dan pekerjaan, serta norma budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat sehingga perlu kebijakan afirmasi, pemberdayaan, dan perlindungan yang lebih kuat.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kondisi Faktual

gender di banyuwangi masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan, di mana perempuan menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, dominasi di sektor kerja informal dengan upah rendah, serta keterbatasan layanan kesehatan reproduksi yang memadai; selain itu, kasus kekerasan berbasis gender masih tinggi dan sering tidak dilaporkan karena stigma sosial, sementara partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik masih rendah akibat budaya patriarki, sehingga perempuan menanggung beban ganda antara pekerjaan dan urusan rumah tangga tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang isu gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan masyarakat, meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta memastikan partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan publik sehingga tercipta pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang isu gender meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi melalui kesempatan kerja yang setara, penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan dan dukungan terhadap peran ganda perempuan, serta perubahan norma sosial dan budaya menuju kesetaraan gender yang berkeadilan.

Harapan atau Dampak

Harapan dari penyusunan Peraturan Bupati tentang isu gender adalah terciptanya masyarakat yang lebih adil, setara, dan inklusif, di mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta ruang partisipasi publik. Dampak yang diharapkan adalah menurunnya kasus kekerasan berbasis gender, meningkatnya kualitas hidup perempuan, terwujudnya pemberdayaan ekonomi keluarga, serta terbentuknya budaya baru yang mendukung kesetaraan gender sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

[Kembali](#)

[Simpan dan Review](#)

12. Klik Generate Policy Brief untuk memproses AI

The screenshot shows the 'Policy Brief AI' web application. At the top, there is a header with the JDIH logo, the title 'Policy Brief AI', and the subtitle 'BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI'. Navigation links include 'Beranda', 'About', 'Document', 'Tutorial', 'List Policy Brief', and a 'LOGIN' button. The main heading is 'Rancangan Peraturan Bupati tentang gender'. Below this, there are two buttons: 'Generate Policy Brief' (highlighted with a red box) and 'Simpan Edit'. To the right is a 'Download Word' button. The main content area is a text editor with a toolbar and a warning message: 'A valid API key is required to continue using TinyMCE. Please alert the admin to check the current API key. Click here to learn more.' The bottom right corner shows '2802 words' and the 'tiny' logo.

13. Draft Policy Brief telah disusun Oleh AI

This screenshot shows the same interface as the previous one, but the text editor now contains a draft policy brief. The text is as follows:

****POLICY BRIEF RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG GENDER****

****I. LATAR BELAKANG****

Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan mensyaratkan partisipasi aktif serta terjaminnya hak-hak seluruh warga negara, tanpa terkecuali hak-hak yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Isu gender merupakan dimensi krusial dalam pembangunan, yang secara inheren berkaitan dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pengabaian terhadap isu gender cenderung menciptakan ketimpangan struktural yang menghambat potensi individu dan menghambat kemajuan kolektif suatu daerah. Oleh karena itu, komitmen terhadap kesetaraan gender bukan hanya menjadi sebuah pilihan etis, melainkan sebuah keharusan strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Kabupaten Banyuwangi, kondisi faktual menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan yang signifikan dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Perempuan, sebagai salah satu kelompok populasi terbesar, masih menghadapi berbagai hambatan sistemik dalam mengakses hak-hak dasar mereka. Ketimpangan ini termanifestasi dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari akses terhadap layanan publik hingga kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Fenomena ini memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terencana untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Secara khusus, data menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok dalam akses pendidikan bagi perempuan di Banyuwangi, yang seringkali berujung pada keterbatasan pilihan dan kesempatan kerja yang layak. Sebagian besar perempuan masih terkonsentrasi pada sektor kerja informal dengan upah yang rendah, mencerminkan adanya diskriminasi dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan. Selain itu, ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi yang memadai juga masih menjadi isu krusial yang berdampak langsung pada kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Lebih lanjut, isu kekerasan berbasis gender tetap menjadi permasalahan serius di Banyuwangi, dengan tingkat pelaporan yang rendah akibat stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penanganan. Situasi ini diperparah oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik, yang secara langsung membatasi suara dan peran aktif perempuan dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Budaya patriarki yang masih kuat dan dominan di

2802 words tiny

- Jika Hasil AI dirasa kurang sempurna bisa klik Generate Kembali
- Lalu Klik Simpan Edit
- Klik “Tombol Download Word” Untuk di Simpan dokumen ke word

14. Klik List Policy Brief untuk Melihat Daftar Policy Breif yang sudah dibuat

JDIH  **Policy Brief AI**
BAGIAN HUKUM KABUPATEN BANYUWANGI

Beranda About Document Tutorial [List Policy Brief](#) [LOGIN](#)

List Policy Brief

10 entries per page Search:

No	Nama Rancangan	Tanggal	Detail	Word
1	Rancangan Peraturan Bupati tentang gender	2026-07-03 14:58:46	Detail	Word
2	peraturan bupati tentang sampah	2026-07-02 20:19:56	Detail	Word
3	ENYELENGGERAAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI	2026-07-02 15:43:32	Detail	Word

Showing 1 to 3 of 3 entries

15. Susun Draft Policy Brief yang sudah di hasilkan oleh AI ke template Policy Brief yang sudah diteapkan seperti contoh Struktur Policy Breif di awal atau bisa klik link atau scan barcode berikut:

SCAN DOKUMEN

TEMPLATE POLICY BRIEF

Silakan pindai QR Code di samping atau klik link berikut untuk mengunduh Template **Policy Brief**.

<https://bit.ly/template-policy-brief>

Format Dokumen
Microsoft Word (.docx)
Gunakan template ini sebagai acuan dalam penyusunan Policy Brief.

>>>>

SCAN DI SINI



atau kunjungi link berikut:
<https://bit.ly/template-policy-brief>

PENUTUP

Manual Book ini disusun sebagai pedoman penggunaan Aplikasi Policy Brief AI bagi seluruh OPD di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Diharapkan setiap pengguna dapat mengikuti tahapan yang dijelaskan sehingga proses penyusunan policy brief menjadi lebih cepat, efektif, dan menghasilkan dokumen yang berkualitas.

Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan fitur atau perubahan pada aplikasi, maka manual book ini akan disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan aplikasi maupun panduan penggunaan ini.